
**ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON RECEIPTS, EXPENSES &
CASH TRANSPARENCY AT BANJAR SERASAN VILLAGE OFFICE**

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PENERIMAAN, PENGELUARAN &
TRANSPARANSI KAS DI KANTOR KELURAHAN BANJAR SERASAN**

Oleh:

Andi Farhan^{*1)}, Muhammad Emir YA²⁾, Wukuf Dilvan R³⁾

^{1&2)} Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat - Indonesia

³⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat - Indonesia

Email: beraksichanel@gmail.com^{*1)}, b1031201147@student.untan.ac.id²⁾, wukuf.dilvan@ekonomi.untan.ac.id³⁾

* Korespondensi

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 23 Juni 2023

Artikel Diterima: 31 Juli 2023

ABSTRACT

The purpose of this study was to understand the implementation of the Accounting Information System on Cash Receipts, Disbursements, and Transparency in the Banjar Serasan Village Office. This study uses a qualitative approach to gain a comprehensive understanding. The research data consists of primary data obtained through interviews with informants involved in the financial management process, as well as secondary data obtained through observation and documentation studies. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation studies. The analytical method used in this study adopts a postpositivism philosophy, which focuses on objective understanding and objective data analysis. The data collected was analyzed thematically, identified emerging patterns and themes, and given an in-depth interpretation. The results showed that the accounting information system implemented in the Banjar Serasan Village Office made a significant contribution to the mechanism of cash receipts and disbursements. However, research also finds that transparency to the public is limited due to local regulations that prohibit public disclosure of financial information. Informants in this study revealed that these limitations are the result of policies that have been set and must be followed.

Keywords: Accounting Information System, Cash Receipt, Cash Disbursement, Cash Transparency, Banjar Serasan Village Office.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada Penerimaan, Pengeluaran, dan Transparansi Kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi filosofi postpositivisme, yang berfokus pada pemahaman objektif dan analisis data yang obyektif. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, diidentifikasi pola dan tema yang muncul, serta diberikan interpretasi yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang diterapkan di Kantor Kelurahan Banjar Serasan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas. Namun, penelitian juga menemukan bahwa transparansi kepada masyarakat terbatas dikarenakan adanya peraturan daerah yang melarang pengungkapan informasi keuangan secara publik. Informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa keterbatasan ini adalah hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan dan harus diikuti.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Transparansi Kas, Kantor Kelurahan Banjar Serasan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang pesat di era revolusi industri 4.0 saat ini dengan dampak yang dapat dilihat dengan jelas pada beberapa wilayah Indonesia. Organisasi membutuhkan berbagai macam data sekarang dan di masa depan untuk melacak tindakan operasional yang dilakukan melalui fasilitas bisnis saat ini. Informasi dianggap sebagai sumber daya perusahaan yang paling penting dan vital. Fakta-fakta ini dapat dikonsultasikan oleh organisasi saat membuat keputusan. Informasi saat ini merupakan elemen penting bagi kemajuan organisasi karena persaingan yang ketat, ekonomi yang berkembang pesat dan kemajuan teknologi. (Yasinta, 2020).

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah, kewenangan menguasai urusan pemerintahan, kemampuan melindungi lingkungan hidup melalui prakarsa lokal, hak atas daerah asal, dan/atau pengakuan nilai-nilai tradisional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan desa swasembada dalam rangka meningkatkan pendapatan asli mereka dan mengakomodasi operasi bisnis. Desa sekarang memiliki kesempatan untuk menemukan potensi mereka sendiri. Sesuai dengan upaya Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) untuk meningkatkan perekonomian desa, maka BUMDes dikendalikan oleh masyarakat dan pemerintah desa serta dibentuk sebagai badan hukum berdasarkan kebutuhan dan potensi desa terdekat.

Menurut (Wahid Wachyu Adi Winarto, 2022), efektivitas sistem informasi dapat dikaitkan dengan seberapa ramah pengguna dan seberapa efektif pengguna sistem menggunakannya. Hal ini dikarenakan teknologi sistem informasi digunakan oleh organisasi untuk membantu karyawan dalam menjalankan tugasnya. Jika informasi yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi memuaskan pengguna dan memenuhi harapan mereka, maka sistem tersebut dianggap sangat baik. Sistem informasi akuntansi sendiri merupakan salah satu sumber informasi, khususnya informasi keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait. Baik pemangku kepentingan internal dan eksternal mungkin terlibat dalam pemanfaatan informasi keuangan.

Menurut (Sadewi Tittus Silvi & Adiputra Made Pradana, 2022), Agar sistem pengumpulan dan pengeluaran kas pada akhirnya sesuai dengan norma manajemen yang ditetapkan, proses yang efisien harus ada. Penipuan, pencurian, dan penggelapan terjadi ketika uang diterima dan didistribusikan di luar prosedur yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada penipuan yang terlibat dalam proses pengumpulan dan pengeluaran kas, sistem akuntansi organisasi akan berjalan lebih efektif. Selain itu, akan

mudah untuk mendeteksi setiap kejadian penipuan dan pencurian yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. (Early Ridho Kismawadi, 2020).

Menurut (Andriano & Evan, 2019) transparansi mengacu pada semua lembaga, prosedur, dan informasi pemerintah yang harus terbuka untuk umum dan memadai untuk dipahami dan dipantau oleh pihak yang berkepentingan. Dengan mengembangkan sistem informasi akuntansi yang akurat, dimungkinkan untuk mendorong keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan data secara lebih cepat, efektif dan efisien.

Pada sistem informasi akuntansi, beberapa peneliti lain telah melakukan studi ekstensif. Seperti (Sari Ika Maya dkk., 2022) melakukan analisis terhadap pemanfaatan sistem informasi penerimaan kas dan akuntansi pembayaran oleh koperasi Mina Samudra Kendari. Mereka menemukan bahwa koperasi Mina Samudra Kendari menggunakan teknik manual dan komputerisasi untuk mencatat sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas Koperasi Mina Samudra Kendari belum berjalan sebaik yang diharapkan. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap peran memiliki tujuan berbeda yang harus dipenuhi, strategi berbeda untuk mencapai tujuan tersebut, aksesibilitas ke ruang kerja dan alat, serta penggunaan.

Terdapat fenomena yang didasarkan pada, ungkapan Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi dana desa merupakan salah satu dari tiga jenis korupsi pengelolaan keuangan yang paling banyak terjadi. Aparat pemerintah, khususnya kepala desa, terkena dampak fenomena korupsi yang merajalela. Pada 28 September, Satgas 1 Direktorat Pembinaan Partisipasi Masyarakat KPK Rino Haruno menyampaikan sosialisasi program dan arahan teknis Kampung Antikorupsi Kabupaten Purworejo di Ruang Pengarahan Sekretariat Daerah. "Hal ini dibuktikan dengan adanya 601 kasus korupsi yang melibatkan 686 tersangka dari pemerintah daerah. Dengan bantuan program Desa Antikorupsi, diharapkan tidak ada lagi perangkat desa yang terlibat kasus korupsi, imbuhnya. *Menurutnya, persoalan maraknya korupsi dana desa diperparah dengan minimnya sumber daya manusia yang tidak mengetahui dan kurang informasi tentang aturan keuangan desa. Diperkirakan bahwa budaya antikorupsi akan berkembang di tingkat desa berdasarkan pengetahuan tentang topik tersebut. Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi operasional desa, mulai dari pelayanan, pembangunan, hingga penetapan prioritas penggunaan keuangan desa. Rino mengatakan, Kenyataannya, banyak kepala desa yang masih ingin bekerja dengan baik tetapi tidak mengetahui prosedurnya. Program sosialisasi dan arahan teknis Desa Anti Korupsi diresmikan oleh Bupati Purworejo Agus Bastian. Sejumlah perwakilan kepala desa, camat, dan pimpinan perangkat daerah juga hadir. Menurut Bupati, desa*

berperan penting dalam pembangunan Indonesia dan menjadi model bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal utama dan paling krusial yang harus dilakukan jika ingin Indonesia maju adalah memperbaiki desa.

Diketahui bahwa, Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan, maka pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk keuangan desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membantu pelaksanaan proyek dan kegiatan yang mendorong pemberdayaan lokal. Sejak tahun 2015, pemerintah telah memberikan dana desa dengan total tidak kurang dari Rp. 468 triliun, klaimnya. Bupati melanjutkan dengan mengatakan bahwa diharapkan Desa ini lebih siap untuk menjadi Desa Anti Korupsi dengan bantuan nasehat ini. Desa Antikorupsi hadir dengan semangat pemberantasan korupsi dan penegakan integritas, bukan hanya untuk memenuhi dokumentasi atau indikasi. Gemah ripah loh jinawi, ujarnya, *“Diharapkan desa yang sejahtera akan muncul jika desa sudah anti korupsi”*.

Selain itu, banyak studi telah dilakukan pada sistem informasi akuntansi. Penelitian sebelumnya telah menghasilkan sekumpulan temuan yang saling bertentangan. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa belum pernah ada penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini dengan melakukan tinjauan pustaka. beberapa penelitian yang telah dilakukan:

1. (Sari Ika Maya dkk., 2022) melakukan penelitian Analisis Koperasi Mina Samudera Kendari Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
2. (Dewi dkk., 2018) melakukan penelitian pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Mandala Giri Amertha Tajun untuk mengetahui efektivitas sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan.
3. (LUTFIYAH, 2018) melakukan penelitian Analisis efektivitas penerapan Sistem Informasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas berbasis software di Koperasi As-Sakinah 'Aisiyah Kota Malang.
4. (Yasinta, 2020) mengkaji sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas CV Adi Bangau Motor Aceh Besar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, frasa berikut ini paling tepat menggambarkan rumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana proses penerimaan dan pengeluaran kas yang sedang berjalan di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
2. Apa kekurangan dan hambatan yang terkait dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan saat ini di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
3. Sejauh mana tingkat transparansi kas yang tercapai melalui sistem informasi akuntansi yang ada di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?

4. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang disesuaikan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
5. Apa manfaat dan dampak yang diharapkan dari implementasi sistem informasi akuntansi yang disempurnakan di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?
6. Apa strategi yang tepat untuk mengimplementasikan dan mengelola perubahan sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan?

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi didefinisikan oleh (Suri Mustika Intan & Puspaningrum Ajeng Savitri, 2020) sebagai segala sesuatu yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data untuk membuat informasi untuk pengambilan keputusan (Aiyub dkk., 2022). Informasi akuntansi dapat secara luas dicirikan sebagai kumpulan tindakan yang menggambarkan pengelolaan data organisasi keuangan dan pemrosesan data tindakan menggunakan sistem informasi komputer yang terintegrasi dengan mulus dan metode untuk melacak aktivitas akuntansi dalam komunikasi dengan sumber daya teknologi informasi. Suatu sistem dianggap memiliki sistem informasi jika mengoordinasikan formulir, catatan, dan laporan untuk menyediakan data yang diperlukan atau bukti pencatatan dalam pengelolaan produksi keuangan dalam suatu organisasi.

2.2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Setiap organisasi membutuhkan arsitektur sistem untuk memastikan kelancaran operasi bisnis. Untuk bertahan dalam bisnis, sebuah perusahaan harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari saat berhadapan dengan para pesaingnya. Selain masalah lain yang dihadapi perusahaan, sistem informasi akuntansi memainkan peran penting dalam motivasi tujuan perusahaan. Sistem informasi akuntansi harus berusaha untuk menyampaikan informasi dalam bentuk laporan yang jelas selama operasinya, terutama laporan kepada manajemen yang menjadi dasar pengambilan keputusan organisasi. Sesuai dengan (Lantari Ni Made, 2023). "Sistem informasi akuntansi dirancang khusus untuk mendukung operator sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan internal, dan memenuhi kewajiban terkait kontrol kapal".

2.3. Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Berbagai pengguna memerlukan dan memanfaatkan sistem informasi akuntansi. Menurut (Ardilia & Putu Devi Desak, 2021), Tujuan dasar sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: harus mampu menawarkan berbagai data akuntansi berkualitas tinggi, termasuk data yang tepat waktu, gigih, akurat, dan menyeluruh. Disarankan untuk melakukannya

sebaik mungkin mengingat informasi akuntansi secara keseluruhan berguna dan bermanfaat. (Yasinta, 2020)

Keunggulan sistem informasi akuntansi bagi pengguna. Menurut (Faiz Zamzami, 2021), yaitu:

- Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kaliber output.
- Efektivitas sistem informasi akuntansi dapat ditingkatkan.
- Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan.
- Sistem informasi akuntansi dapat membuat perusahaan lebih kompetitif.

Berikut tugas sistem informasi akuntansi menurut (SIREGAR, 2019):

- Mengumpulkan informasi tentang aktivitas perusahaan dan memprosesnya dengan benar.
- Menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan.
- Mengidentifikasi perlindungan yang diperlukan untuk menjamin bahwa informasi tentang transaksi bisnis ditangkap, diproses, dan diamankan dengan benar dari akses tidak sah dan aktivitas lainnya.

2.4. Pengguna Sistem Informasi Akuntansi

Ada dua kelompok pengguna sistem informasi yang digariskan oleh (Kardiyono, 2017), yaitu:

- Kelompok internal:** kelompok internal mencakup semua elemen yang terdapat dalam organisasi pemerintahan. misalnya perangkat desa dan perangkat desa yang memanfaatkan sistem informasi akuntansi dinas untuk kantor kelurahan.
- Kelompok eksternal:** Penduduk Kecamatan Banjar Serasan khususnya, serta masyarakat umum yang meminta laporan akuntansi dari organisasi afiliasi, semuanya dianggap sebagai kelompok eksternal karena mereka berada di luar pengaturan kelurahan. Seringkali, laporan akuntansi yang diperlukan berbentuk laporan keuangan seperti laporan arus kas.

2.5. Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah dokumen yang dibuat untuk membantu pelaksanaan kegiatan penerimaan kas atau dari pengumpulan piutang yang tersedia dan bebas digunakan untuk operasi umum.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyatakan bahwa “Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Manajemen penerimaan dan pembayaran kas pemerintah, kemampuan peramalan arus kas yang akurat, dan manajemen saldo kas pemerintah adalah tiga blok bangunan fungsional yang harus ada bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan kas

pemerintah yang efektif, menurut (Rasyid Rosyeni, 2023).

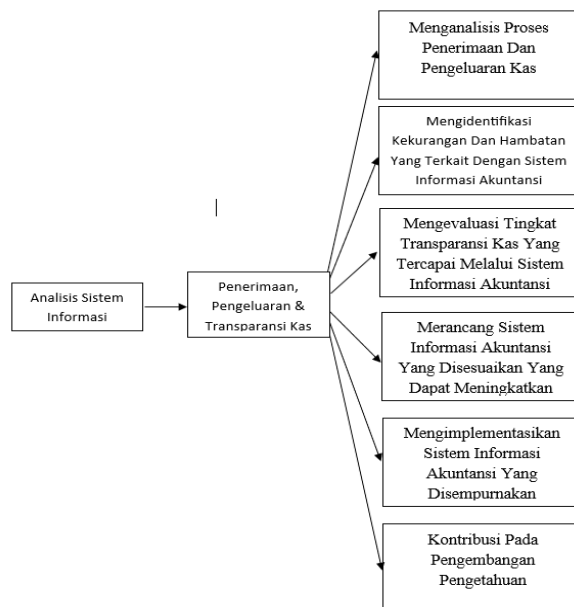
2.6. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi distribusi kas menurut (Sari, 2020) "Membicarakan tentang menghabiskan uang yang digunakan untuk pembayaran dan pembelian yang dilakukan dengan kredit atau tunai". Pengeluaran tunai mencakup cek dan pembayaran tunai. Transaksi keuangan yang dikenal sebagai pengeluaran kas menyebabkan penurunan jumlah uang tunai yang dimiliki lembaga sebagai aset. Berdasarkan bukti transaksi pendukung, seperti bukti penerimaan produk, order pembelian, dan lain-lain, transaksi dari pengeluaran kas didokumentasikan dengan formulir pengeluaran kas elektronik dan kemudian dicatat oleh komputer melalui jurnal pengeluaran kas. Biaya operasional termasuk bunga dan perbedaan nilai tukar lainnya yang dicatat di monumen inilah yang menyebabkan penurunan uang tunai yang terjadi.

2.7. Transparansi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Fajarudin, 2021), transparansi mencakup semua aspek pemerintahan dan kelembagaan. Semua pihak yang berkepentingan harus memiliki akses ke informasi yang cukup untuk pemahaman dan kontrol. Dengan mengembangkan sistem informasi akuntansi yang tepat, dimungkinkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan data secara lebih cepat, efektif dan efisien.

2.8. Alur Penelitian



Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Gambar 1. Model Penelitian

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menganalisis teori dan praktik yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Desa Banjar Serasan secara deskriptif kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Kajian ini dilakukan di Desa Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, dimana kantor ini berfungsi sebagai wadah pengelolaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan dan pembangunan lingkungan..

3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari staff kantor kelurahan Banjar Serasan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan, termasuk pegawai administrasi, bendahara atau pengelola keuangan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman terkait akuntansi umum dan berpartisipasi dalam aktivitas terkait daerah Banjar Serasan. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang praktik akuntansi yang ada di lingkungan tersebut.

3.4. Objek Penelitian

Fokus kajian ini adalah besarnya transparansi sistem dan sistem informasi yang berkaitan dengan pemungutan dan pengeluaran kas di Desa Banjar Serasan.

3.5. Data dan Jenis Data

Data kualitatif terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh

1. Data Primer: Informasi dari sumber primer, Kantor Kelurahan Banjar Serasan, dengan kualifikasi data kualitatif, seperti gambaran instansi umum, prosedur yang berlaku, dan informasi hasil wawancara dengan aparat desa tentang penelitian dan pengamatan data secara langsung.
2. Data Sekunder: Siklus arus kas masuk dan pengeluaran dan sumber pustaka lainnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Pertama, diwawancarai pegawai kantor kecamatan Banjar Serasan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh wawasan langsung mengenai praktik, prosedur, dan penggunaan sistem informasi akuntansi yang ada. Selanjutnya, metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung praktik pengelolaan keuangan di kantor kelurahan Banjar Serasan. Melalui observasi, penulis dapat menggali pemahaman tentang implementasi sistem informasi akuntansi, interaksi antar pegawai, serta proses penerimaan dan pengeluaran kas secara real-time. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik

dokumentasi. Di kantor kecamatan Banjar Serasan, penulis mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan aturan, peraturan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Dokumentasi ini memberikan data sekunder yang penting untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konteks dan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan di kantor tersebut.

3.7. Analisis Data

Pendekatan analisis penelitian ini mengadopsi filosofi postpositivisme yang menekankan pada pemahaman objektif dan analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik, diidentifikasi pola dan tema yang muncul, serta diberikan interpretasi yang mendalam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Sesuai dengan kriteria informan yang sudah disebutkan di populasi dan sampel yaitu pimpinan serta para staff Kantor Kelurahan Banjar Serasan, Banyak informan yang bersedia berbagi informasi tentang berbagai aspek penelitian yang dilakukan peneliti. Tabel data informan yang digunakan dalam investigasi ini ditunjukkan di bawah ini:

No.	Informan	Status
1	NH	Pejabat Pemerintah
2	W	Pejabat Fungsional
3	RW	Lembaga Masyarakat Desa
4	AF	Masyarakat Desa yang Paham

Sumber: Data yang Dikelola (2023)

Gambar 2. Data Informan

4.2. Proses Penerimaan dan Pengeluaran Kas

4.2.1. Analisis terhadap proses penerimaan kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, termasuk prosedur pengumpulan, pencatatan, dan verifikasi penerimaan kas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada (W) sebagai pejabat fungsional "penerimaan kas di kelurahan banjar serasan dikumpulkan melalui pengumpulan catatan manual dari bukti penerimaan kas yang ada, lalu di catat menggunakan software oleh staff administrasi, dan diverifikasi. Contoh software yang di gunakan adalah sipkd (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) dan simakda (sistem informasi manajemen keuangan daerah)".

Proses penerimaan kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan melibatkan beberapa langkah, yaitu pengumpulan, pencatatan, dan verifikasi penerimaan kas. Dengan Alur masuk:

- a. Pengumpulan Kas: Penerimaan kas Desa Banjar Serasan dikumpulkan melalui pencatatan manual bukti penerimaan kas yang sudah ada sebelumnya.

Beberapa sumber, termasuk pembayaran dari warga, organisasi pemerintah, atau pihak lain yang melakukan transaksi keuangan dengan kelurahan, dapat memberikan informasi tentang penerimaan kas.

- b. Pencatatan Kas: Setelah dikumpulkan, bukti penerimaan kas ini dicatat menggunakan software oleh staff administrasi. Software yang digunakan sebagai contoh adalah sipkd (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) dan simakda (sistem informasi manajemen keuangan daerah). Pencatatan menggunakan software ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengolah data penerimaan kas, serta memungkinkan aksesibilitas data secara elektronik.
- c. Verifikasi Kas: Setelah pencatatan, penerimaan kas perlu diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan kas yang dicatat sesuai dengan bukti yang ada. Verifikasi dapat melibatkan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti penerimaan kas, seperti membandingkan dengan rekapitulasi yang ada, memeriksa kelengkapan informasi, dan memastikan adanya tanda tangan atau persetujuan yang sah.

Dengan menggunakan kombinasi pengumpulan manual dan pencatatan menggunakan software, serta dilakukan verifikasi terhadap penerimaan kas, Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat memperoleh sistem yang terstruktur dalam mengelola kas. Hal ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap aliran kas masuk, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses penerimaan kas.

- 4.2.2. Analisis terhadap proses pengeluaran kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, termasuk prosedur pengajuan, otorisasi, dan pencatatan pengeluaran kas.

Proses pengeluaran kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan melibatkan beberapa langkah, yaitu pengajuan, otorisasi, dan pencatatan pengeluaran kas. Berikut adalah analisis terhadap proses tersebut:

- a. Pengajuan Pengeluaran Kas: Pengeluaran kas dilakukan melalui pengajuan kepada pejabat fungsional yang berwenang. Pengajuan ini mungkin dilakukan oleh unit atau individu yang membutuhkan dana untuk keperluan tertentu, seperti pembayaran tagihan, biaya operasional, atau kegiatan lainnya. Pengajuan ini bisa berbentuk proposal, formulir, atau dokumen lain yang berisi rincian mengenai tujuan pengeluaran, jumlah dana yang dibutuhkan, dan justifikasi yang memadai.
- b. Otorisasi Pengeluaran Kas: Setelah pengajuan diajukan, pengeluaran kas perlu melewati proses otorisasi. Pihak penanggung jawab realisasi kas yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyetujui

pengajuan tersebut. Mereka akan memverifikasi keabsahan pengeluaran, memeriksa ketersediaan dana, dan mengevaluasi kepatutan pengeluaran sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

- c. Pencatatan Pengeluaran Kas: Setelah pengajuan dikonfirmasi dan diotorisasi, pencatatan pengeluaran kas dilakukan menggunakan software pencatatan yang ada. Pencatatan ini dilakukan oleh pejabat fungsional atau staf administrasi yang bertanggung jawab. Software tersebut dapat membantu dalam mencatat rincian pengeluaran, termasuk informasi seperti tanggal, jumlah, tujuan pengeluaran, dan rincian lain yang relevan. Data yang dihasilkan dari pencatatan ini akan digunakan untuk pemantauan dan pelaporan keuangan yang lebih baik.

Selain itu, setelah pengeluaran terealisasi, pejabat fungsional juga bertanggung jawab untuk meminta keterangan bukti realisasi, seperti faktur, kwitansi, atau dokumen pendukung lainnya. Informasi ini kemudian dicatat kembali oleh pejabat fungsional menggunakan software yang tersedia.

Dengan menggunakan prosedur pengajuan, otorisasi, dan pencatatan pengeluaran kas yang terstruktur dan didukung oleh software pencatatan, Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat memperoleh kontrol yang lebih baik dalam mengelola pengeluaran kas. Proses ini membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian yang tepat terhadap aliran kas keluar dari kelurahan.

Data tersebut berdasarkan wawancara peneliti terhadap (W) sebagai pejabat fungsional di mana "*untuk pengeluaran kas dilakukan pengajuan kepada pejabat fungsional dan di catat menggunakan software pencatatan, lalu di otorisasikan kepada pihak penanggung jawab realisasi kas tersebut dan di mintai keterangan bukti realisasi dan di catat kembali oleh pejabat fungsional dengan menggunakan software yang ada*".

- 4.2.3 Evaluasi terhadap efektivitas proses penerimaan dan pengeluaran kas yang sedang berjalan, mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan.

Berikut penilaian efektivitas prosedur pengambilan dan pengeluaran kas Kantor Banjar Serasan Kelurahan, serta beberapa saran untuk potensi kekurangan dan perbaikan yang dapat dilakukan:

1. Kelemahan dalam proses penerimaan kas:
 - a. Pengumpulan manual: Pengumpulan catatan manual dapat memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Kemungkinan terjadi kehilangan atau kekurangan bukti penerimaan kas.
 - b. Pencatatan menggunakan software: Jika tidak ada pengawasan dan pelatihan yang memadai, kesalahan dalam mencatat data pengeluaran

dapat terjadi, seperti kesalahan pengetikan atau kesalahan pemilihan kategori pengeluaran.

- c. Verifikasi yang terbatas: Tanpa proses verifikasi yang ketat, ada risiko adanya kesalahan, kebocoran, atau penyalahgunaan dana.

Potensi perbaikan:

- a. Penggunaan teknologi: Pemikiran untuk mengadopsi metode pengumpulan kas yang lebih efisien, seperti menggunakan sistem pembayaran elektronik, dapat mengurangi keterbatasan dan meningkatkan akurasi pengumpulan data penerimaan kas.
 - b. Automatisasi pencatatan: Mengimplementasikan sistem otomatisasi pencatatan yang terintegrasi dengan pengumpulan kas dapat mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses pencatatan.
 - c. Penguatan verifikasi: Memperkuat proses verifikasi dengan langkah-langkah seperti pemeriksaan lintas-referensi, validasi data, dan audit internal yang teratur dapat membantu menjamin integritas penerimaan kas dan mengurangi risiko kesalahan.
2. Kelemahan dalam proses pengeluaran kas:
- a. Kurangnya kejelasan prosedur pengajuan: Jika prosedur pengajuan tidak ditetapkan dengan jelas, dapat terjadi ambiguitas dan kebingungan dalam pengajuan pengeluaran kas.
 - b. Keterbatasan otorisasi: Jika tidak ada tingkat otorisasi yang memadai, risiko pengeluaran yang tidak terkontrol atau tidak sesuai kebijakan dapat terjadi.
 - c. Keterbatasan pengendalian pencatatan: Tanpa kontrol yang efektif, pencatatan pengeluaran dapat terlambat, tidak lengkap, atau tidak akurat.

Potensi perbaikan:

- a. Pemutakhiran prosedur pengajuan: Menyusun pedoman yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur pengajuan pengeluaran kas akan membantu mengurangi kebingungan dan memastikan konsistensi dalam proses tersebut.
- b. Peningkatan tingkat otorisasi: Mengidentifikasi tingkat otorisasi yang tepat dan memastikan bahwa proses otorisasi melibatkan pihak yang berwenang dapat membantu meningkatkan kontrol atas pengeluaran kas.
- c. Peningkatan pemantauan dan pengendalian pencatatan: Mengadopsi sistem yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap pencatatan pengeluaran dan menerapkan mekanisme pengendalian yang ketat dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan pencatatan.

Perbaikan-perbaikan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengendalian dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan. Namun, penting untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk staf administrasi dan pejabat fungsional, dalam implementasi perubahan ini dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya.

4.3. Kekurangan dan Hambatan Sistem Informasi Akuntansi yang Ada

- 4.3.1 Identifikasi kekurangan dan hambatan yang terkait dengan sistem informasi akuntansi yang digunakan saat ini di Kantor Kelurahan Banjar Serasan.

Berdasarkan wawancara terhadap (NH) selaku pejabat pemerintahan “Sistem informasi akuntansi di kantor kelurahan banjar serasan sudah menggunakan software pembantu sesuai dengan arahan pemerintah daerah yaitu sipkd (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) dan simakda (sistem informasi manajemen keuangan daerah) dan juga terdapat pencatatan manual untuk mengantisipasi apabila terdapat eror pada software pembantu.”

Berikut ini adalah penilaian terhadap efektivitas prosedur pengumpulan dan pengeluaran kas Kantor Banjar Serasan Kelurahan, serta beberapa saran untuk kekurangan dan perbaikan potensial yang dapat dilakukan:

- a. Keterbatasan Fungsionalitas: Meskipun Kantor Kelurahan Banjar Serasan menggunakan software pembantu seperti SIMAKDA dan SIPKD yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah, namun ada kemungkinan bahwa sistem ini memiliki keterbatasan dalam fitur dan fungsionalitasnya. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di kantor tersebut.
- b. Integrasi antara Sistem: Jika SIMAKDA dan SIPKD tidak terintegrasi secara efektif dengan sistem-sistem lain di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, seperti sistem administrasi atau sistem pengelolaan data lainnya, dapat terjadi kesulitan dalam pertukaran informasi antara sistem-sistem tersebut. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas data yang diperlukan untuk proses akuntansi.
- c. Ketergantungan pada Pencatatan Manual: Meskipun telah menggunakan software pembantu, kantor tersebut masih mengandalkan pencatatan manual sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau eror pada software. Pencatatan manual dapat menjadi proses yang rentan terhadap kesalahan manusia dan memerlukan waktu dan sumber daya tambahan.
- d. Potensi Kesalahan dan Duplikasi Data: Ketergantungan pada pencatatan manual dan penggunaan software pembantu secara terpisah dapat meningkatkan risiko kesalahan dan duplikasi data.

Ketidaksesuaian antara data yang dicatat secara manual dan data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat menghasilkan informasi yang tidak konsisten atau tidak akurat.

- e. **Pelatihan dan Keterampilan Pengguna:** Jika pengguna tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam penggunaan sistem informasi akuntansi, terutama terkait dengan software pembantu yang digunakan, mereka mungkin menghadapi hambatan dalam memanfaatkan secara penuh fitur-fitur yang disediakan oleh sistem tersebut. Kurangnya keterampilan dan pemahaman dapat menghambat efisiensi dan akurasi penggunaan sistem.
- f. **Keamanan Informasi:** Pentingnya menjaga keamanan data dan informasi keuangan menjadi faktor kunci dalam sistem informasi akuntansi. Jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data sensitif dan mengamankan akses ke sistem, maka Kantor Kelurahan Banjar Serasan berisiko mengalami kebocoran data atau penyalahgunaan informasi keuangan.

Dalam menghadapi kekurangan dan hambatan tersebut, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan saat ini di Kantor Kelurahan Banjar Serasan. Upaya perbaikan dapat melibatkan peningkatan pelatihan pengguna, integrasi sistem yang lebih baik, pembaruan software, dan implementasi langkah-langkah keamanan informasi yang lebih kuat untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

4.3.2 Evaluasi terhadap ketersediaan data, keakuratan informasi, dan integrasi sistem dalam konteks penerimaan, pengeluaran, dan transparansi kas.

Dari wawancara terhadap (NH) dikatakan bahwa *“data tentang penerimaan, pengeluaran kas tercatat dengan jelas menggunakan pencatatan manual dan juga aplikasi simakda dan sipkd oleh staff administrasi karena data tersebut akan di serahkan kepada walikota sebagai realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran, akan tetapi data transparansi tidak tersedia bagi masyarakat sesuai dengan aturan daerah”*

Evaluasi terhadap ketersediaan data, keakuratan informasi, dan integrasi sistem dalam konteks penerimaan, pengeluaran, dan transparansi kas menunjukkan bahwa data tentang penerimaan dan pengeluaran kas tercatat dengan jelas menggunakan pencatatan manual dan juga aplikasi Simakda dan SIPKD oleh staff administrasi. Data ini merupakan bagian penting yang akan diserahkan kepada walikota sebagai realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran.

Namun, terdapat kekurangan dalam transparansi data, karena informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat tidak tersedia sesuai dengan aturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum tidak memiliki akses ke informasi penting tentang penerimaan, pembayaran, dan pengungkapan kas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan dalam ketersediaan data dan keakuratan informasi yang berkaitan dengan kas. Selain itu, diperlukan integrasi sistem yang memungkinkan akses terbuka bagi masyarakat sesuai dengan aturan daerah yang berlaku. Dengan demikian, akan tercipta transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dan penggunaan dana kas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

Sesuai dengan (PP nomor 58 Tahun 2005) tentang pengelolaan daerah Pasal 4 Ayat 1 *“keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk umum”*.

4.3.3 Analisis dampak kekurangan dan hambatan sistem informasi akuntansi terhadap efisiensi operasional dan pelaporan keuangan.

Kekurangan dan hambatan sistem informasi akuntansi yang diidentifikasi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat berdampak pada efisiensi operasional dan pelaporan keuangan. Berikut adalah analisis dampak dari kekurangan dan hambatan tersebut:

1. Efisiensi Operasional:

- a. **Keterbatasan Fungsionalitas:** Jika sistem informasi akuntansi memiliki keterbatasan dalam fitur dan fungsionalitasnya, dapat menghambat efisiensi operasional. Misalnya, jika sistem tidak dapat mengotomatisasi beberapa proses akuntansi, staf harus melakukan tugas-tugas tersebut secara manual, yang memakan waktu dan sumber daya tambahan.
- b. **Integrasi antara Sistem:** Kurangnya integrasi antara sistem-sistem yang digunakan di kantor dapat menyebabkan kesulitan dalam pertukaran informasi. Hal ini dapat menghambat aksesibilitas data yang diperlukan untuk proses akuntansi dan mengakibatkan staf harus melakukan upaya tambahan untuk mencari dan memasukkan data secara manual ke dalam sistem yang berbeda.

2. Pelaporan Keuangan:

- a. **Ketergantungan pada Pencatatan Manual:** Meskipun telah menggunakan software pembantu, ketergantungan pada pencatatan manual dapat menyulitkan proses pelaporan keuangan. Pencatatan manual rentan terhadap kesalahan manusia, yang dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau tidak konsisten dalam laporan keuangan.
- b. **Potensi Kesalahan dan Duplikasi Data:** Ketergantungan pada pencatatan manual dan penggunaan software pembantu terpisah meningkatkan risiko kesalahan dan duplikasi data. Ketidaksesuaian antara data yang dicatat

secara manual dan data yang dimasukkan ke dalam sistem dapat menghasilkan informasi yang tidak konsisten atau tidak akurat dalam laporan keuangan.

- c. Keterbatasan Transparansi: Jika informasi keuangan yang relevan tidak tersedia untuk masyarakat, hal ini dapat mengurangi transparansi pelaporan keuangan. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi yang diperlukan untuk memahami dan memantau penggunaan dana publik.

Dampak-dampak tersebut dapat menghambat efisiensi operasional kantor dan mengurangi kualitas pelaporan keuangan. Proses manual yang rentan terhadap kesalahan dan duplikasi data memerlukan waktu dan sumber daya tambahan yang dapat mengganggu efisiensi operasional. Selain itu, kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengatasi dampak-dampak ini, perlu dilakukan upaya perbaikan seperti meningkatkan pelatihan pengguna, integrasi sistem yang lebih baik, penggunaan software yang lebih canggih, dan peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Dengan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelaporan keuangan, Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan membangun kepercayaan masyarakat.

4.4 Tingkat Transparansi Kas

- 4.4.1 Evaluasi tingkat transparansi kas yang tercapai melalui sistem informasi akuntansi yang ada di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, termasuk ketersediaan informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas.

Ketersediaan data yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengeluaran kas termasuk dalam evaluasi tingkat transparansi kas yang dicapai oleh sistem informasi akuntansi yang ada di Kantor Desa Banjar Serasan. Tenaga administrasi mencatat transaksi dan pengeluaran kas secara akurat menggunakan manual pencatatan serta program Simakda dan Sipkd; namun, sesuai dengan undang-undang setempat, publik tidak memiliki akses ke data ini. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan kepada publik.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Memperbarui kebijakan transparansi: Kantor Kelurahan Banjar Serasan perlu meninjau dan memperbarui kebijakan terkait transparansi kas. Kebijakan ini harus memastikan bahwa informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas secara terbuka tersedia bagi masyarakat sesuai dengan aturan daerah yang berlaku.
- b. Mengoptimalkan sistem informasi akuntansi: Dinas Kelurahan Banjar Serasan bertanggung jawab

memastikan sistem informasi akuntansi yang meliputi program Simakda dan Sipkd dapat memberikan laporan keuangan yang jelas dan sederhana. Untuk menjamin bahwa data yang ditangkap akurat dan terkini, diperlukan pelatihan dan pemantauan yang memadai.

- c. Meningkatkan publikasi informasi keuangan: Situs resmi Kantor Kelurahan Banjar Serasan atau media lain yang dapat diakses publik harus sering mempublikasikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas. Semua pihak yang berkepentingan harus dapat memahami dan mengakses informasi ini jika diberikan dengan cara yang dapat dimengerti.
- d. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan: Masyarakat perlu diinformasikan tentang nilai transparansi keuangan dan hak mereka untuk mengakses informasi ini oleh Kantor Kelurahan Banjar Serasan. Selain itu, personel administrasi harus menerima pelatihan agar mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan benar dan menjamin integritas data.
- e. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan: Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum atau kelompok pemantau keuangan yang independen, yang dapat membantu mengawasi penggunaan dana secara transparan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat transparansi kas yang tercapai melalui sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan akan meningkat, sehingga informasi terkait penerimaan dan pengeluaran kas dapat tersedia secara transparan bagi masyarakat.

- 4.4.2 Identifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi yang lebih baik, seperti pelaporan yang lebih rinci atau aksesibilitas informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tingkat transparansi di kantor lurah banjar serasan sudah cukup baik bagi internal ataupun kepada pemerintah pusat, serta pelaporan yang dilakukan sudah rinci sesuai dengan standar yang ada, hanya saja terdapat keterbatasan pada masyarakat akan informasi realisasi kas yang ada karena aturan daerah yang di ungkapkan oleh (NH) selaku pejabat pemerintahan.

Area yang perlu di tingkatkan hanya pada masyarakat, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa informasi realisasi kas juga dapat diakses oleh masyarakat.

Perlu dilakukan langkah-langkah berikut ini untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi:

- a. Membuat kebijakan yang mendukung transparansi: Kantor Lurah Banjar Serasan perlu mengkaji ulang kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa transparansi keuangan meliputi aksesibilitas

informasi kepada masyarakat. Kebijakan ini harus menjamin bahwa informasi realisasi kas disediakan secara terbuka dan mudah diakses sesuai dengan aturan daerah yang berlaku.

- b. Menyediakan saluran informasi yang mudah diakses: Kantor Lurah Banjar Serasan harus membuat saluran yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi realisasi kas. Saluran ini dapat berupa situs web resmi, pusat informasi di kantor kelurahan, atau media lain yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Penyebaran informasi harus mudah dipahami dan bebas hambatan.
- c. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi: Kantor Lurah Banjar Serasan perlu mengadakan kegiatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjelaskan pentingnya transparansi keuangan dan hak mereka untuk mengakses informasi realisasi kas. Dalam kegiatan ini, dapat disampaikan secara rinci bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- d. Memperkuat peran lembaga pengawas: Agar realisasi arus informasi lancar, kerjasama dengan lembaga regulator keuangan perlu ditingkatkan. Kantor Lurah Banjar Serasan dapat bekerja sama dengan organisasi pengawasan untuk menyediakan akses informasi dan menjamin pelaporan yang akurat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan keterbatasan aksesibilitas informasi realisasi kas yang ada di Kantor Lurah Banjar Serasan dapat diatasi. Hal ini akan meningkatkan tingkat transparansi dan memastikan bahwa masyarakat juga memiliki akses yang sama terhadap informasi keuangan yang relevan.

4.5 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi yang Disesuaikan

- 4.5.1 Pengembangan perancangan sistem informasi akuntansi yang disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dan temuan sebelumnya.

Meskipun peneliti tidak dapat memberikan rancangan sistem informasi yang sesuai karena hal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah pusat, namun kantor kelurahan Banjar Serasan telah melakukan upaya untuk berbagi informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor kelurahan kepada masyarakat. Ini dapat memberikan indikasi umum tentang arah arus kas, meskipun secara tidak langsung.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada (RW) selaku lembaga kemasyarakatan desa "*Anggota kelurahan banjar serasan berperan aktif dalam proses penyaluran dana, kegiatan, serta perawatan daerah pada wilayah banjar serasan, masyarakat sudah merasakan dampak baiknya dari pihak kelurahan*" dan AF selaku masyarakat desa menambahkan "memang benar bahwa transparansi keuangan tidak dilakukan

pihak kantor kelurahan kepada masyarakat dan juga itu membuat dana yang dimiliki menjadi tidak diketahui jelas kemana arahnya walau kami sebagai warga tetap yakin akan integritas dari pihak kelurahan"

Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa walaupun aturan daerah tidak memperbolehkan transparansi kas kantor kelurahan Banjar Serasan kepada masyarakat, kantor kelurahan tersebut telah mengambil langkah positif dengan menyediakan sarana untuk berbagi informasi kegiatan. Meskipun tidak mencakup semua detail atau informasi keuangan yang lengkap, langkah ini dapat memberikan pemahaman umum kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh kantor kelurahan dan sejauh mana penggunaan dana tersebut.

Dalam hal ini, penting untuk terus mendorong kantor kelurahan Banjar Serasan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- a. Meningkatkan detail informasi yang dibagikan: Kantor kelurahan Banjar Serasan dapat memperluas informasi yang dibagikan kepada masyarakat dengan memberikan detail lebih lanjut mengenai kegiatan dan penggunaan dana. Hal ini dapat dilakukan dengan memperjelas data keuangan, anggaran, dan menyelesaikan proyek-proyek publik sehingga masyarakat umum dapat memahaminya dengan lebih baik.
- b. Memperkuat komunikasi dengan masyarakat: Kantor kelurahan Banjar Serasan perlu meningkatkan komunikasi aktif dengan masyarakat untuk menjelaskan tujuan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Dengan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat, dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan aliran kas.
- c. Mengadvokasi perubahan kebijakan: Jika aturan daerah yang menghambat transparansi kas kantor kelurahan masih berlaku, kantor kelurahan dapat mengadvokasi perubahan kebijakan tersebut. Kantor kelurahan dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga pengawas, dan pihak terkait lainnya untuk memperjuangkan kebijakan yang memungkinkan transparansi yang lebih baik.

Meskipun langkah-langkah ini tidak sepenuhnya mengatasi kendala yang ada, tetapi dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan transparansi kas kantor kelurahan Banjar Serasan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, penting untuk terus mendorong perubahan positif dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

4.6 Implementasi dan Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Baru

Beberapa faktor antara lain keterbatasan peraturan daerah yang tidak memperbolehkan transparansi kas

kepada publik dan implementasi sistem informasi akuntansi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat menyebabkan implementasi baru dan evaluasi sistem informasi akuntansi di Kantor Desa Banjar Serasan tidak dapat dilakukan.

Sistem informasi akuntansi yang ada saat ini perlu dipertahankan meskipun implementasi dan penilaian baru tidak dapat dilakukan. Dengan melakukan pemeliharaan rutin, merilis perangkat lunak baru, dan memberikan pelatihan kepada tenaga administrasi yang akan menggunakan sistem, Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat terus meningkatkan kehandalan dan efektivitas sistem yang telah diinstal sebelumnya.

Selain itu, meskipun transparansi kas terbatas bagi masyarakat, Kantor Kelurahan Banjar Serasan dapat tetap berkomitmen untuk memberikan informasi yang relevan melalui sarana berbagi informasi kegiatan yang telah mereka sediakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada masyarakat tentang penggunaan dana dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor desa, dalam situasi ini sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Meskipun terdapat kendala dalam implementasi dan evaluasi baru terhadap sistem informasi akuntansi, kantor kelurahan Banjar Serasan dapat tetap berfokus pada upaya pemeliharaan dan peningkatan sistem yang ada serta berkomitmen untuk memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat dalam batasan yang diperbolehkan oleh aturan daerah yang berlaku.

4.7 Strategi Implementasi dan Pengelolaan Perubahan

Ada beberapa alasan mengapa strategi dan manajemen perubahan tidak dapat diterapkan di Kantor Desa Banjar Serasan, antara lain belum memadainya peraturan daerah yang mengatur keterbukaan kas publik, kelangkaan sumber daya, dan kebijakan pemerintah pusat yang melarang penggunaan informasi akuntansi sistem.

Meskipun strategi implementasi dan pengelolaan perubahan tidak dapat dilakukan, Kantor Kelurahan Banjar Serasan masih dapat melakukan upaya terbatas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya. Hal ini dapat meliputi pemeliharaan rutin terhadap sistem yang telah ada, pelatihan bagi staf administrasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem, dan peningkatan komunikasi internal untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan.

Kantor Kelurahan juga dapat melakukan evaluasi internal secara periodik untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan keadaan dan batasan yang ada. Meskipun perubahan besar mungkin tidak dapat dilakukan, perbaikan inkremental dan peningkatan proses internal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan.

Kantor Kelurahan Banjar Serasan harus mengabdikan diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya seefektif mungkin meskipun ada tantangan dalam menerapkan strategi dan perubahan manajemen. Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dalam situasi ini, sangat penting untuk memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi internal, dan melakukan tinjauan rutin.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data jawaban yang didapat oleh informan, terdapat beberapa kesimpulan penelitian yang dapat diambil:

1. Proses penerimaan dan pengeluaran kas di Kantor Kelurahan Banjar Serasan adalah bahwa proses penerimaan kas melibatkan pengumpulan manual dari bukti penerimaan kas yang kemudian dicatat menggunakan software seperti Simakda dan Sipkd.
2. Kekurangan dan hambatan sistem informasi akuntansi yang digunakan saat ini di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, ditemukan beberapa masalah. Keterbatasan fungsionalitas, kurangnya integrasi antara sistem-sistem, ketergantungan pada pencatatan manual, potensi kesalahan dan duplikasi data, kurangnya pelatihan pengguna, keamanan informasi yang tidak memadai, dan keterbatasan transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi hambatan yang perlu diatasi.
3. Evaluasi tingkat transparansi kas yang tercapai melalui sistem informasi akuntansi yang ada di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, ditemukan bahwa meskipun data tentang penerimaan dan pengeluaran kas tercatat dengan jelas menggunakan pencatatan manual dan aplikasi Simakda dan Sipkd, informasi tersebut tidak tersedia secara terbuka bagi masyarakat sesuai dengan aturan daerah.
4. Analisis kebutuhan dan temuan sebelumnya, meskipun tidak dapat memberikan perancangan sistem informasi akuntansi yang disesuaikan karena telah dilakukan oleh pemerintah pusat, Kantor Kelurahan Banjar Serasan telah melakukan upaya untuk berbagi informasi kegiatan kepada masyarakat.
5. Meskipun tidak dapat dilakukan implementasi dan evaluasi baru terhadap sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan karena keterbatasan aturan daerah dan implementasi pemerintah pusat yang sudah dilakukan, penting untuk tetap menjaga dan mempertahankan sistem informasi yang telah ada.
6. Dan, tidak dapat dilakukan strategi implementasi dan pengelolaan perubahan secara menyeluruh pada Kantor Kelurahan Banjar Serasan karena

keterbatasan aturan daerah, sumber daya, dan kebijakan pemerintah pusat terkait sistem informasi akuntansi.

5.2. Saran

1. Untuk mengatasi kekurangan dan hambatan sistem informasi akuntansi yang digunakan di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, direkomendasikan untuk meningkatkan pelatihan pengguna, melakukan integrasi sistem yang lebih baik, menggunakan software yang lebih canggih, dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.
2. Untuk meningkatkan tingkat transparansi kas melalui sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, perlu dilakukan pembaruan kebijakan transparansi, optimalisasi sistem informasi akuntansi, peningkatan publikasi informasi keuangan, sosialisasi dan pelatihan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
3. Untuk mengatasi kekurangan sistem informasi akuntansi yang sudah ada, Kantor Kelurahan Banjar Serasan perlu memperluas informasi yang dibagikan kepada masyarakat, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, dan mengadvokasi perubahan kebijakan. Selain itu, penting juga untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dengan memperbarui kebijakan yang mendukung transparansi.
4. Meskipun tidak dapat dilakukan implementasi dan evaluasi baru terhadap sistem informasi akuntansi di Kantor Kelurahan Banjar Serasan, disarankan untuk melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan perangkat lunak, dan pelatihan staf administrasi.
5. Untuk penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk mengkaji badan usaha milik negara sebagai fokus penelitian, mengingat dampaknya yang sangat luas.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang harus diatasi pada penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah kekurangan penelitian:

1. Kurangnya pemahaman peneliti terhadap Undang-Undang yang mengatur peraturan desa mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti terpaksa mengandalkan ungkapan dari informan sebagai sumber informasi utama. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti lebih memperdalam pengetahuan tentang peraturan desa guna memperluas cakupan dan keakuratan temuan penelitian.
2. Selain itu, peneliti juga menghadapi kendala karena kurangnya dasar yang kuat dalam menyampaikan pendapat yang tegas kepada informan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, sangat diharapkan memiliki keberanian yang lebih besar dalam mengemukakan pendapat yang benar dan jelas kepada informan. Hal ini akan memungkinkan

peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan memperoleh data yang lebih akurat..

DAFTAR REFERENSI

- Aiyub, S. E., Ec, M., Adnan, S. E., Si, M., & Jullimursyida, E. (2022). *Digital Human: Formulasi Pengembangan Human Capital Untuk Keunggulan Daya Saing Industri*. Www.Sefabumipersada.Com
- Andriano, & Evan. (2019). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Panti Asuhan Al – Maa’uun Yosowilangun*. Http://Meryna.Web.Id
- Ardilia, & Putu Devi Desak. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan Tampaksiringpetang*. 1–29.
- Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., Putra, N., Jurusan, Y., & Program, A. (2018). *Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun)*. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 9, Nomor 3).
- Early Ridho Kismawadi. (2020). *Fraud Pada Lembaga Keuangan Dan Nonkeuangan* (Nurachma Sahara, Ed.; 1 Ed.). Pt. Rajagrafindo Persada.
- Faiz Zamzami, N. D. N. I. A. F. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi* (Andayani, Ed.). Gadjah Mada University Press.
- Fajarudin. (2021). *Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora, 1*, 1–10.
- Kardiyono. (2017). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Lantari Ni Made. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kecamatan* (Jullimursyida, Ed.). Sefa Bumi Persada.
- Lutfiyah. (2018). *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Berbasis Softwaredi Koperasias-Sakinah „Aisiyah Kota Malang*. 1–123.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Sap)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Rasyid Rosyeni. (2023). *Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja* (Hidayati, Ed.). Pt Raja Grafindo Persada.
- Sadewi Tittus Silvi, & Adiputra Made Pradana. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Kedukaan Pada Organisasi Non-Profit (Studi Kasus Pada Gereja Bethel Injil Sepenuh "Bukit Doa" Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12.
- Sari Ika Maya, Hasbudin, & Aminah Titi. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Mina Samudera Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (Jak)*, 7, 1–15.
- Sari, P. A. P. (2020). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis*.
- Siregar, R. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Bagi Pemimpin Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Yayasan Universitas Labuhanbatu*.
- Suri Mustika Intan, & Puspaningrum Ajeng Savitri. (2020). Sistem Informasi Manajemen Berita Berbasis Web. Dalam *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (Jtsi)* (Vol. 1, Nomor 1). [Http://Jim.Teknokrat.Ac.Id/Index.Php/Sisteminformasi](http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi)
- Wahid Wachyu Adi Winarto. (2022). *Audit Sistem Informasi* (Nasrudin Moh, Ed.; 1 Ed.). Pt Nasya Expanding Management.
- Yasinta. (2020). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Cv Adi Bangau Motor Aceh Besar*.